

**PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI
DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN DATI II
PANGKEP**



BUSUWA

OLEH

ANDI SYAMSUDDIN

45 87 020 134

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"

1994

HALAMAN PENGESAHAN

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 03 April 1997

Skripsi Atas Nama : Andi Syamsuddin

No. Stb / Nirm : 4587020139/88110954

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara.

Pengawas Umum,

UNIVERSITAS

(Prof.Mr.Dr.H.A.Zainal Abidin Farid,SH) (Prof.Drs.H.Sadly AD,MPA)

Rector Universitas "45"

Dekan Fisipol UNHAS

Panitia Ujian

BUSUWA

(Drs. Guntur Karnaeni)

ketua

(Drs. Suparman Makkah)

Sekretaris

Tim Penguji

Penguji : 1. Drs. H. PS. Rahim, MS. (.....)

2. Drs. S. Belopadang, MS (.....)

3. Drs. La Nafie M. Ed (.....)

4. Drs. Guntur Karnaeni (.....)

HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini *Selasa* tanggal *03* bulan *April* tahun 1994

Skripsi dengan judul : PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
ASLI DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PANGKEP.


N a m a : Andi Syamsuddin
Nomor STB / NIRM : 4587020134 / 8811330954
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. S. Belopadang, MS.-


Drs. M. Natsir Tompo.-

Mengetahui :


Drs. Guntur Karnaeni,-

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara,

Drs. H. Mohammad Thala.-

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dan patut penulis ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, oleh karena berkat dan bimbingan-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara Universitas "45" Ujung Pandang.

Sebagai insan yang mempunyai keterbatasan, maka suatu pekerjaan yang baru akan menimbulkan banyak permasalahan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Demikianlah yang sama telah dialami penulis dalam penyusunan skripsi ini, namun karena dorongan kemauan yang keras dan bimbingan serta petunjuk dari Bapak-Bapak Konsultan yang tidak mengenal lelah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis persembahkan kepada segenap pembaca untuk menelaah kembali dan penulis senantiasa menerima kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dan berguna ke arah kesempurnaan, agar dapat termanfaat bagi masyarakat, bangsa dan agama.

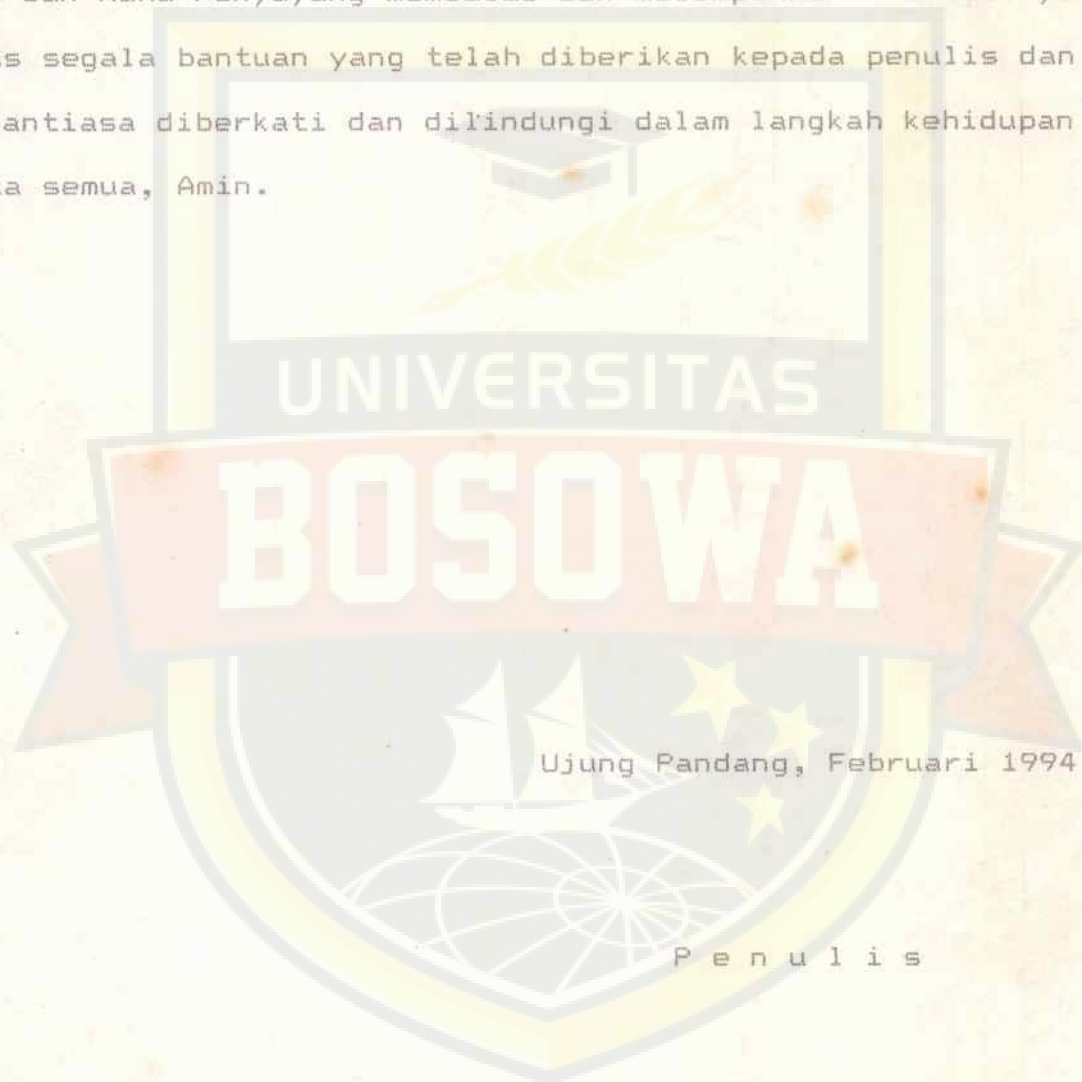
Dengan terwujudnya skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan dan saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati perkenankan-

lah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, S. H. selaku Rektor pada Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. S. Belopadang, MS. dan Bapak Drs. M. Natsir Tompo selaku pembimbing I dan pembimbing II atas ketabahannya memberikan petunjuk-petunjuk dan saran yang sangat berguna mulai dari awal penyusunan hingga pada penyelesaiannya, pada Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak/Ibu Dosen serta segenap karyawan yang melayani penulis selama berada dalam perkuliahan.
6. Bapak Pimpinan beserta seluruh stafnya pada kantor Kepala Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang telah menerima dan melayani penulis selama pengadaaan penelitian.
7. Akhirnya kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis serta memberikan biaya mulai dari bangku SD sampai ke Perguruan Tinggi, terimalah sembah sujud ananda sebagai tanda terima kasih yang setinggi-tingginya, juga kepada kakak-kakakku tersayang,

seluruh keluarga, kerabat dan handai taulan serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan-arahan hingga penulis menyelesaikan studi.

Akhir kata teriring salam doa semoga Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas dan melimpahkan rahmat-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan senantiasa diberkati dan dilindungi dalam langkah kehidupan kita semua, Amin.



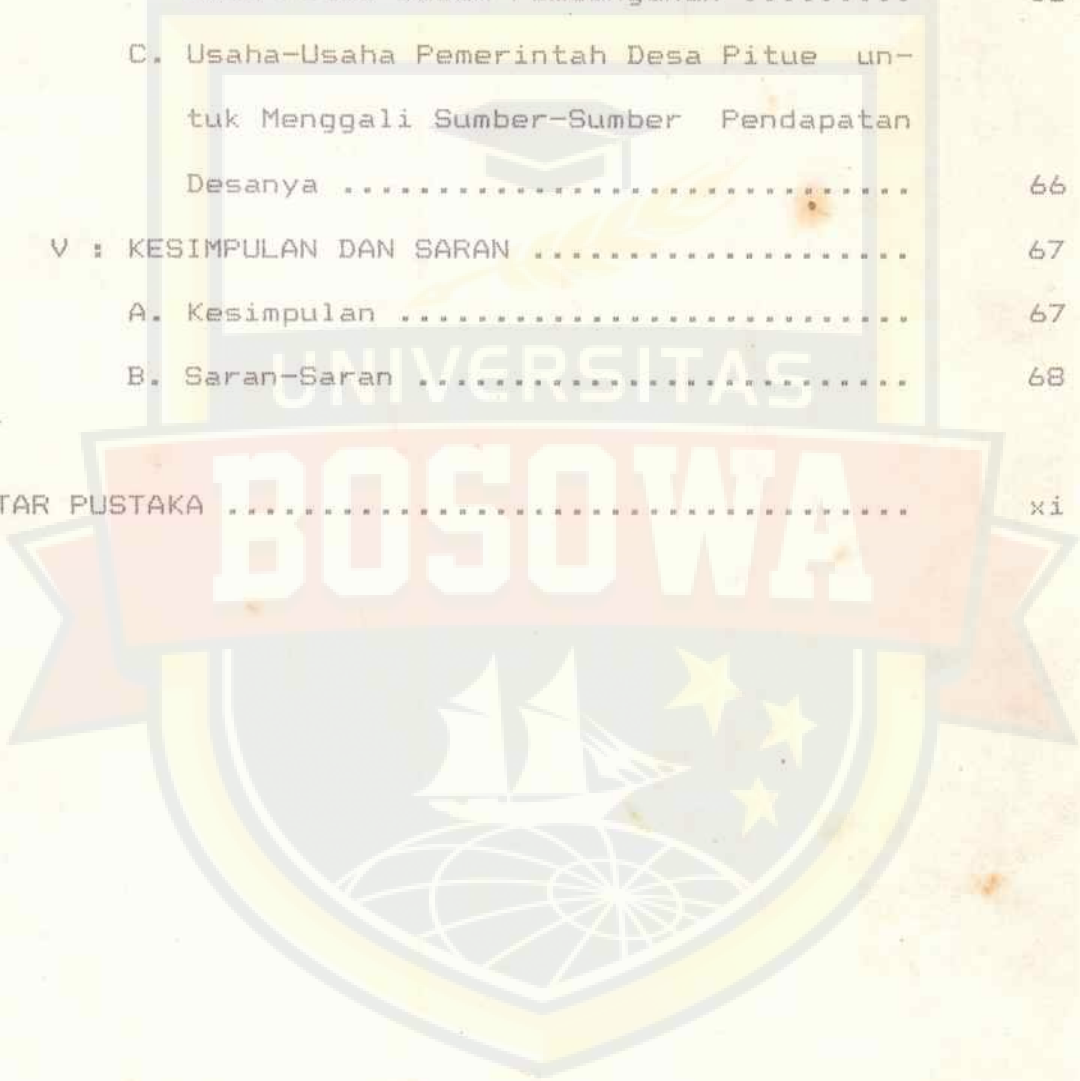
Ujung Pandang, Februari 1994

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pengelolaan dan Pembangunan	8
B. Pengertian Desa	11
C. Sumber-Sumber Pendapatan Desa	13
D. Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa	24
E. Struktur dan Mekanisme Anggaran Desa	30
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Keadaan Geografis	35
B. Keadaan Demografis	37
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	46

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa	49
B. Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue Dalam Pembangunan	56
C. Usaha-Usaha Pemerintah Desa Pitue un- tuk Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Desanya	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	xi



UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1 : Luas Areal Persawahan dan Perkebunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan	36
TABEL 2 : Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1993/1994	37
TABEL 3 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendi- dikan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1993/1994	39
TABEL 4 : Keadaan Penduduk Menurut Mata Penecha- rian di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1993	40
TABEL 5 : Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang 1993	41
TABEL 6 : Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Pitue	43
TABEL 7 : Jumlah dan Jenis Sarana Keagamaan De- sa Pitue Kecamatan Ma'rang	44
TABEL 8 : Jumlah dan Jenis Sarana Pemasaran di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang	45
TABEL 9 : Jumlah dan Jenis Sarana Perhubungan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang	45

TABEL 10 : Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1991/1992	52
TABEL 11 : Tanggapan Responden Atas Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue ...	56
TABEL 12 : Distribusi Pengeluaran Keuangan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan ...	58
TABEL 13 : Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue di Bidang Prasarana Fisik ..	62
TABEL 14 : Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue di Bidang Prasarana Sosial	63
TABEL 15 : Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue di Bidang Prasarana Perhubungan	64
TABEL 16 : Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue pada Pembangunan Lain-lain	65
TABEL 17 : Tanggapan Responden Atas Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Pitue	67
TABEL 18 : Tanggapan Responden Atas Usaha Pemerintah Desa Pitue Untuk Menggali Sumber Pendapatan Desa	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan nasional yang terus-menerus digalakkan oleh pemerintah yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pembangunan di bidang pendapatan desa, yang terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga diharapkan mewujudkan derajat kehidupan yang optimal.

Sejalan dengan hal itu pula dasar pembangunan daerah menggariskan pokok kebijaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa sebagai berikut :

1. Investasi dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan memanfaatkan potensi alam.
2. Menunjang tercapainya tujuan nasional yang meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
3. Mendorong terciptanya pemerataan dan hasil-hasilnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Dalam teori organisasi dijumpai adanya seperangkat sumber daya (resource) selain manusia juga diperlukan pula uang, materil, mesin, metode dan waktu yang ini sering pula disebut sumber daya manusialah yang berperan sebagai pengendali sumber lainnya. Manusiaslah yang dapat menggunakan

metode dengan baik. Tetapi sebaliknya, manusia pula yang mungkin merusak hutan dan lingkungan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat daerah sampai kepada di tingkat pedesaan agar dapat turut berpartisipasi dalam meningkatkan peran serta terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan jalan memberikan rangsangan untuk lebih aktif menggali sumber-sumber pendapatan desa.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam mewujudkan keikutsertaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa Pitue dalam pembangunan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan dapat ditentukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparat pemerintah kecamatan dan khususnya seluruh aparat pemerintah desa sebagai inti pelaksana dan pengelola sumber-sumber pendapatan desa dalam pembangunan, baik fisik maupun pembangunan non fisik.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan pada umumnya dan tidak luput dari berbagai hambatan, kendala, serta tantangan dalam mencapai suatu tujuan pembangunan. Karena yang sudah menjadi tradisi bahwa manusia dalam melakukan tugasnya selalu mendapat atau menghadapi berbagai masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar.

Mengenai apa yang terjadi di Wilayah Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dimana masyarakat kurang memperhatikan aturan kebijaksanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah dewasa ini.

Hal ini sangat menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan terutama di daerah sebab masyarakat dalam keberadaannya merupakan bagian dari pelaksana pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas, yang diharapkan maupun memberi dukungan terutama dari segi pelaksanaannya, maupun manfaat tersebut. Hal inilah merupakan suatu hambatan yang harus segera dipecahkan bersama agar pembangunan berjalan dengan baik.

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pankajene Kepulauan ?
- b. Bagaimanakah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue dalam pembangunan Desa Pitue ?
- c. Bagaimanakah usaha-usaha Pemerintahan Desa Pitue dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desa Pitue ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui apakah pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Desa pitue di Desa Pitue

Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

b. Untuk mengetahui usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

2. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan sebagai berikut :

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan khususnya Kepala Desa Pitue dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa Pitue atau mengambil keputusan yang menyangkut sumber-sumber pendapatan Desa Pitue.

b. Mendorong para peneliti lainnya untuk melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

c. Sebagai bahan komparatif atas penelitian selanjutnya.

D. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian deskriptif yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti.

2. Dasar penelitian survei yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dari suatu obyek atau populasi tertentu dimana hasilnya berlaku bagi obyek atau populasi yang bersangkutan.

3. Populasi dan Sampel.

- a. Populasi adalah keseluruhan atau sejumlah obyek yang ada di Desa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

Adapun jumlah penduduk sebanyak 1.194 orang.

- b. Untuk mendapatkan sampel dari penelitian ini diambil dari masing-masing dusun yang ada di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan menggunakan purposif sampling. Mengenai jumlah responden yang dipilih adalah sebanyak 45 orang dengan perincian sebagai berikut :

Dusun Gusunge	15 orang
Dusun Cibollo	15 orang
Dusun Macinna	15 orang
Jumlah	45 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen serta majalah-majalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

- b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian yang langsung dilakukan pada obyek penelitian dengan cara :

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang bersangkutan sambil mencatat data yang diperlukan.

2. Wawancara/interview yaitu mengadakan tanya jawab dengan pejabat atau orang yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
3. Angket/Kusioner yaitu dengan membagikan angket/kusioner kepada responden.

5. Analisa Data

Sesuai dengan data primer yang diperoleh atau terkumpul maka data tersebut ditabulasi kemudian dianalisa. Adapun analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Kelima bab tersebut dibahas secara beraturan dengan sistematika sebagai berikut :

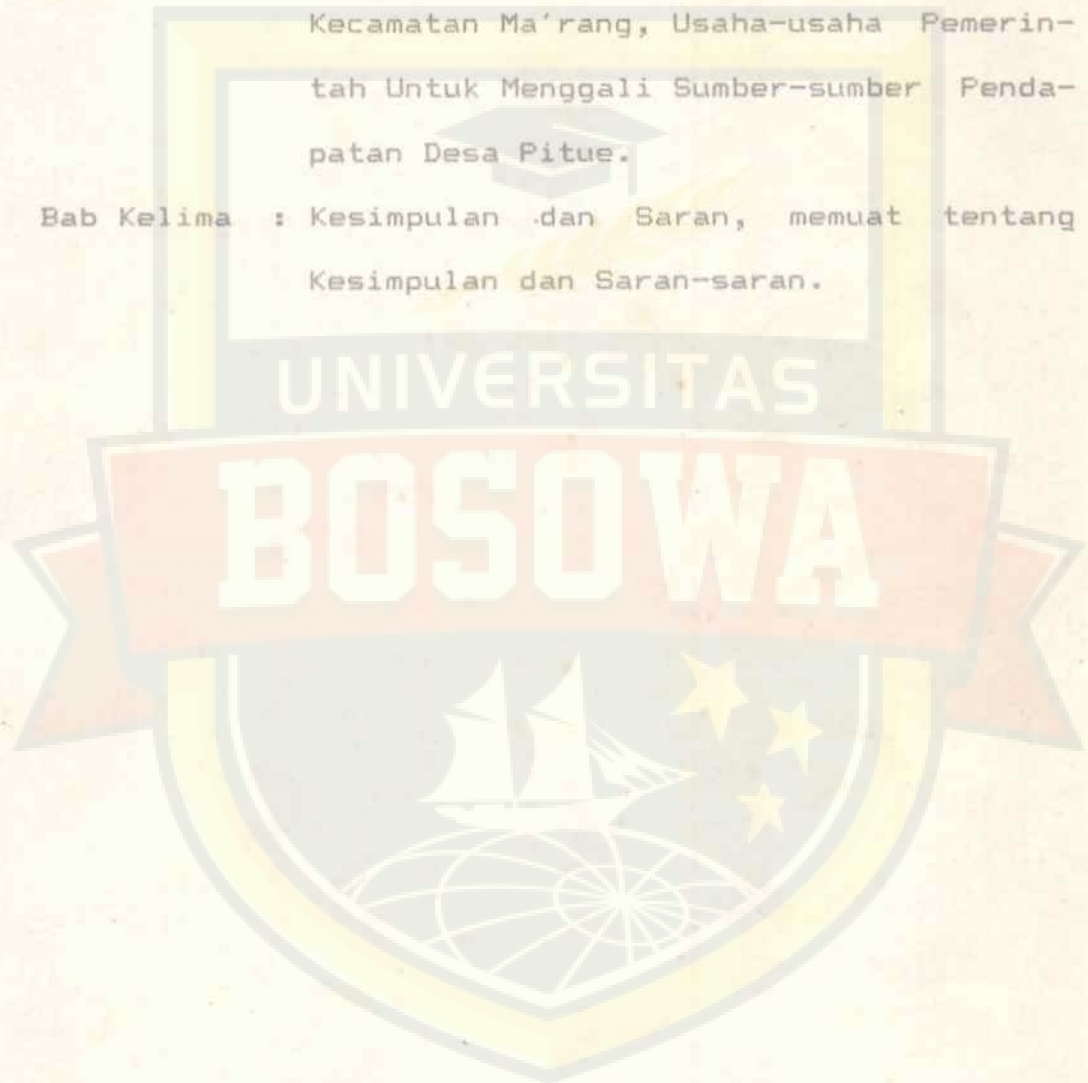
Bab pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Kegunaan Penelitian, Rumusan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, meliputi Pengertian Pengelolaan, Pengertian Desa, Sumber-sumber Pendapatan Desa, Peningkatan Pendapatan Desa dan Struktur dan Mekanisme Anggaran Desa.

Bab Ketiga : Gambaran umum Lokasi Penelitian, memuat antara lain : Keadaan Geografis, Keadaan Demografis dan Struktur Pemerintahan Desa Pitue.

Bab Keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa Pitue, Pemanfaatan Sumber-sumber Pendapatan Desa Pitue Dalam Pembangunan Kecamatan Ma'rang, Usaha-usaha Pemerintah Untuk Menggali Sumber-sumber Pendapatan Desa Pitue.

Bab Kelima : Kesimpulan dan Saran, memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan dan Pembangunan

Karena pengelolaan yang digunakan dalam skripsi ini, pengertian adalah pengurusan, menurut dalam kamus umum Bahasa Indonesia itu dalam pengertiannya bahwa pengelolaan berasal dari kata "kelola" (mengola) yang artinya sama dengan mengurus (dalam hal pemerintahan, perusahaan) dan sebagainya. Mengelola juga punya arti sama dengan melakukan (pekerjaan) disamping itu "pengelola" diartikan sama dengan pengurus atau penyelenggaraan atau pengurusan. Dengan demikian sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri No. I tahun 1982 tentang sumber-sumber pendapatan desa, pengurusan dan pengawasannya dijelaskan bahwa :

"Pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan (Drs. Suwignjo 1985 : 117).

Dalam istilah ilmiah pengelolaan biasanya disebut manajemen, dimana manajemen itu mempunyai unsur-unsur yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dengan mengevaluasi berhasil tidaknya suatu kegiatan.

Adapun pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh Prof. DR. S. P. Siagian, MPA dalam bukunya filsafat Administrasi dikatakan bahwa :

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan." (Y. Diror : 142 : 1961).

Pendapat lain tentang perencanaan dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjoyo dalam bukunya perencanaan pembangunan merumuskan defenisi perencanaan sebagai berikut :

"Perencanaan adalah meliputi proses kegiatan usaha yang terus-menerus secara menyeluruh dari penyusun suatu rencana, penyusunan program kegiatan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya." (Prof. DR. Bintoro Tjokroamidjoyo : 17 : 1980)

Berdasarkan defenisi perencanaan dan pengelolaan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan dengan perencanaan dalam hubungannya pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa adalah proses kegiatan dalam menentukan dan mengurus jenis-jenis pendapatan suatu desa, sehingga dapat menghasilkan suatu uang atau benda yang dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan suatu desa dalam satu tahun anggaran.

Adapun mengenai defenisi pembangunan yang dikemukakan sebagai berikut :

"Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa." (Prof. DR. S. P. Siagian. MPA : 54 : 1985).

Lihat beberapa pengertian penting yaitu :

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar

dilakukan.

3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana.
4. Bahwa pembangunan kepada modernitas.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional.
6. Hal-hal tersebut di atas dilakukan dengan tujuan kepada usaha-usaha pembinaan bangsa yang terus-menerus dilakukan kepada tujuan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) disebutkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian adalah sebagai berikut :

1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, bahwa pembangunan adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan, maka meskipun pembangunan ekonomi menduduki tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini dan di dalam jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya, mendapat perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah tanah air.
3. Yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat yang tetap berkepribadian Indonesia pula." (GBHN, 12 : 1978).

Dengan pengertian pembangunan di atas adalah merupakan suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan

kesejahteraan lahir bathin secara adil dan merata, oleh karena itulah sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula kepada partisipasi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pengertian Desa

Apa yang dimaksud dengan desa atau lebih tegas lagi defenisi tentang desa, sampai sekarang masih belum penulis menjumpai satu pun batasan yang dapat memenuhi syarat defenisi secara umum belum ada arti sebuah pun yang dapat ditetapkan untuk semua macam kepentingan. Maka oleh karena itu dapat dikemukakan perbedaan yang nyata antara beberapa segi pandangan.

Dari segi geografis maka Prof. DR. Bintoro Tjokroamidjoyo mendefenisikan desa sebagai berikut :

"Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis sosial ekonomis, politik dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain." (Drs. I. Nyoman Baratha, 1985 : 26).

Berdasarkan defenisi di atas maka yang dimaksudkan desa adalah perwujudan geografis atau perwujudan penduduk yang timbul sebagai akibat unsur-unsur kegiatan fisiografis sosial ekonomis, politis dari suatu daerah ke daerah yang lainnya.

Dari segi pergaulan hidup maka Dr. P. J. Bourman mengemukakan defenisi bahwa :

"Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-

ikatan keluarga yang rapat, kepada tradisi kaidah-kaidah sosial." (Drs. I. Nyoman Baratha, 1985 : 26).

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa desa-desa atau nama aslinya yang setingkat adalah :

- "a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan atau bantuan." (Drs. I. Nyoman Baratha, 1985 : 28).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka jelaslah bahwa kehidupan desa berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya baik menurut adat maupun menurut peraturan pemerintah dan daerah. Kemudian berdasarkan peraturan tersebut desa wajib melaksanakan kewenangannya yang diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan yang biasa disebut sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas kewenangan kepala desa tidak mencukupi apabila hanya mengharapkan sumbangan atau bantuan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sumber dana yang lain untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sumber dana yang dapat diperoleh kepala desa untuk menjalankan tugas kewenangannya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa. Untuk mengetahui sumber pendapatan desa akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan topik berikut ini.

C. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai hak dan kewajibannya memerlukan sumber pendapatan-pendapatan untuk dapat digali dan ditingkatkan. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan yang dikuasai desa mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang pemerintahan desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya telah menetapkan jenis sumber pendapatan desa. Tindak lanjut dari peraturan tersebut di daerah masih dalam proses penyusunan, sehingga sementara ini penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan cenderung dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang telah ada pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan kepala desa. Mengenai sumber pendapatan desa dapat kita kemukakan yaitu segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa.

Mengenai pengertian sumber-sumber pendapatan desa tersebut di atas menurut pendapat penulis agak terbatas karena hanya memfokuskan pada sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau terdapat dalam desa di bawah pengelolaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas lebih lanjut dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat timbul karena disebabkan sesuatu hal, sebagai berikut:

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga.
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah lebih atas.

Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah di atasnya untuk mengelola, bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa kendatipun proyek tersebut milik instansi pemerintah.

3. Berdasarkan atas azas pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah desa mendapatkan bantuan pembiayaan tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan kegiatannya.

Untuk mengetahui lebih jelas yang dimaksudkan sumber-sumber pendapatan desa di bawah ini disebutkan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang sumber-sumber pendapatan desa, pengurusan dan pengawasannya, disebutkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari desa sendiri yang terdiri dari :

- a. Kekayaan desa.
- b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
- c. Hasil gotong royong masyarakat desa.
- d. Pungutan desa.
- e. Lain-lain dari usaha desa yang syah, usaha ekonomi desa, lumbung desa, yang berasal dari bantuan desa." (Drs. Suignjo, 1985 : 207).

a. Kekayaan Desa

Kekayaan desa merupakan suatu aset dipunyai oleh

sebahagian desa, oleh karenanya tidak semua desa memiliki tanah kas desa, hanya dimiliki oleh sebagian desa di Indonesia terutama di Jawa. Tanah kas desa tumbuh berdasar atas tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. Hasil dari Tanah desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan kepala desa dan perangkatnya. Berdasarkan tunjangan diberikan kepala desa beserta perangkatnya berbeda pada semua desa. Hal ini disebabkan tidak semua desa memiliki luas dan jenis tanah yang sama. Nama tanah desa untuk kepala desa dan perangkatnya antara lain : Tanah Bengkok, tanah Lunggu, Tanah Pengaren-Aren dan Tanah Pecatuh. Tanah tersebut adalah tanah jabatan terakhir setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Kepala desa dan perangkatnya yang mengalami masa pensiun mendapatkan tanah desa yang disebut Penaren aren sejenis pensiunan. Disamping tanah yang dipergunakan bagi kepala desa dan perangkatnya terdapat pula tanah khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu tanah titisara.

Tanah tersebut dikerjakan oleh warga desa dengan sistem bagi hasil atau diperuntukkan keperluan lain yaitu sistem lelang. Pada umumnya sistem tanah benkol dan tanah titisara hanya terdapat di pulau Jawa, sedang di luar pulau Jawa tidak diketemukan atau

tidak ada. Dengan demikian tanah kas desa merupakan suatu masalah yang baru sehingga memerlukan penjelasan atau penyuluhan untuk masyarakat sistem tersebut. Ditinjau dari potensi wilayah tanah kas desa mungkin sekali direalisasikan di desa-desa di luar pulau Jawa. Di luar pulau Jawa hanya disebut tanah adat atau tanah suku, misalnya tanah negeri di Sumatera Barat. Dengan perubahan status, bukan "Nagari" yang menjadi desa tetapi "Jorong" maka tanah desa akan menjadi permasalahan yaitu bahwa Jorong tidak mendapat sumber pendapatan dari Nagari, karena sumber pendapatan Nagari adalah menurut adat yang tidak dapat dipecah-pecah.

Dengan demikian maka desa harus mencari sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari tanah desa maka kepala desa dan perangkatnya hanya mendapat tunjangan penghasilan dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat tidak memadai. Tingkat penghasilan yang diperoleh aparat pemerintah desa menentukan insentif pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan penghasilan masih sangat rendah (dari dana tunjangan penghasilan pamong desa) dan mata pencaharian aparat pemerintah desa umumnya sebagai petani, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa berkaitan dengan banyaknya kegiatan penduduk di bidang pertanian. Pada

saat kegiatan penduduk sangat meningkat (seperti musim tanam dan panen). Keadaan ini membawa akibat pada penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh dan kecenderungan untuk berkantor di rumah kepala desa dengan jam kerja yang tidak terikat. Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari tanah mempunyai pengaruh besar dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa di sini dimaksudkan sumbangan warga desa dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan desa atas dasar bantuan pembangunan desa diperlukan swadaya dan partisipasi masyarakat. Adapun bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat desa adalah :

- a. Tenaga kerja di desa (manusia dan hewan).
- b. Substitusi tenaga kerja, yaitu penggantian tenaga kerja dinilai dengan uang.
- c. Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Barang atau hasil bumi, yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang untuk dijadikan uang.
- e. Lain-lain (Drs. Suwignjo, 1985 : 209).

Swadaya dan partisipasi masyarakat tersebut di atas sangat penting artinya terutama dalam rangka

pelaksanaan program bantuan desa, makin tinggi partisipasinya, berarti bahwa pembangunan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Hasil dari gotong royong Masyarakat Desa

"Gotong royong adalah bentuk kerja sama dan spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual." (Sri. Suwignjo, 1985 : 209).

Dalam hubungan sumber pendapatan yang penting adalah gotong royong yang timbul akibat kerja sama antara warga desa dengan pemerintah desa. Hasil kerja sama itu misalnya dalam bentuk :

1. Jalan desa untuk memperlancar transportasi;
2. Tanaman peneduh jalan-jalan desa atau jalan-jalan lain dimana hasil tanaman menjadi milik desa sebagai sumber pendapatan desa;
3. Pembuatan kolam-kolam pembibitan ikan;
4. Pembuatan balai musyawarah;
5. Lapangan olah raga;
6. Kebun desa, dan sebagainya." (Sri. Suwignjo, 1985 : 210).

Bangunan tersebut merupakan hasil gotong royong yang dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber pendapatan desa, baik dalam bentuk retribusi desa atau hasil penjualan atau penyewaan dan sebagainya.

d. Pungutan Desa

"Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang dilakukakan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat

desa, berdasarkan perkembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa." (Drs. Suwignjo, 1985 : 210).

Keputusan desa baru berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah. Jenis pungutan serta bentuk dan besarnya tidak sama bagi semua desa. Hal ini disebabkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Jenis dan bentuk pungutan ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya jenis-jenis dan bentuk pungutan, pemerintah desa akan mengetahui lebih lanjut besarnya pungutan yang akan dirumuskan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Selanjutnya penarikan pungutan tersebut dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang dibantu oleh LKMD. Rencana pengeluaran dari hasil pungutan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPPKD). Sehingga penggunaan dari pungutan menjadi lebih jelas dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain yang ditetapkan dalam rencana pungutan tersebut.

e. *Lain-lain pendapat yang sah*

- "1. Lain-lain pendapatan yang sah pungutan yang berasal dari usaha-usaha desa, seperti lumpung desa perusahaan-perusahaan desa, dan sebagainya; Sesuai dengan prioritas pembangunan maka proyek bantuan desa disahkan pada bidang ekonomi. Selanjutnya dengan Inpres Bantuan Pembangunan Desa telah tumbuh dan berkembang usaha peternakan dan perke-

bunan, perikanan laut dan darat, lumbung desa, kios desa, pembakaran kapur, pangkalan kendaraan, terminal desa, dan sebagainya.

Usaha-usaha tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan desa, namun untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut masih diperlukan pengelolaan yang cermat agar tidak merugi atau tidak dimanfaatkan;

2. Permandian umum yang diurus oleh desa. Tidak semua desa mempunyai permandian umum dalam bentuk kolam renang, atau tempat bangunan lain yang diurus langsung oleh desa misalnya adanya sumber air hangat, atau sebagai pendapatan desa. Dalam perkembangan pembangunan sekarang, dimana desa mengalami kesulitan air atau jaringan yang masuk ke rumah-rumah, setiap pemakai diwajibkan membayar sejumlah tertentu;
3. Pasar Desa
Pasar desa adalah pasar yang dibangun oleh desa. Pasar desa dapat merupakan sumber pendapatan desa dalam bentuk retribusi pasar. Selama ini pasar banyak yang dikuasai oleh pemerintah daerah Tingkat II sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tingkat II masih sangat diperlukan, masih belum maju menggali sumber-sumber lain, disamping itu sementara daerah tingkat II yang membagi retribusi tersebut 25% untuk Daerah Tingkat II dan 75% untuk desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dimana pasar desa perlu diatur kembali agar ada keseragaman untuk seluruh Indonesia yang selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah;
4. Sebagian dari biaya perdamaian atas persengketaan yang terjadi di kalangan warga desa yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Desa;
5. Sebagai hasil panen dari penduduk sawahnya yang memperoleh air dari saluran yang diurus oleh pemerintah desa (OPDA) di Nusa Tenggara Timur, Dharma Tirta di Jawa Tengah.
6. Sebagian dari uang saksi jual beli ternak besar atau tanah.
7. Obyek-obyek rekreasi diurus oleh desa, termasuk tempat-tempat keramat.
8. Bangunan milik desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain (misalnya gedung, rumah, balai musyawarah desa).
9. Lain-lain kekayaan milik desa (kursi, lampu, alat pecah-belah dan sebagainya)."

(Drs. Suwignjo, 1985 : 211)

2. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 ditetapkan bahwa sumber pendapatan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah.
- b. Sumbangan dan bantuan pemerintah pusat.
- c. Sebagian dari pajak dan retribusi yang diserahkan kepada desa. (Drs. Suwignjo, 1985 : 213).

a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat yaitu:

1. Tunjangan kurang penghasilan.

Sumbangan ini diberikan dengan anggapan bahwa aparat desa telah mempunyai pendapatan namun jumlahnya tidak memadai, sehingga perlu diberikan tambahan dalam bentuk tunjangan kurang penghasilan.

Tunjangan tersebut diberikan kepada :

- Kepala desa.
- Sekretaris desa.
- Kepala urusan yang berjumlah 3 sampai 5 orang

2. Bantuan pembangunan desa.

Untuk meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan desa diberikan bantuan yang disebut Bantuan Pembangunan desa. Bantuan tersebut

diberikan sejak tahun 1965 terus-menerus meningkat. Permulaan bantuan yang diberikan pada tahun 1969/1970 berjumlah Rp 100.000.-/desa, pada tahun 1983/1984 sebesar Rp 1.250.000.- dan pada tahun 1991/1992 yang berjalan sekarang ini sebesar Rp 3.500.000.-.

Proyek-proyek terdiri dari :

- Prasarana produksi.
- Prasarana perhubungan.
- Prasarana pemasaran.
- Prasarana sosial.
- Prasarana lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya penggunaan bantuan desa diarahkan pada proyek-proyek yaitu:

- Skala prioritas disesuaikan dengan potensi desa dan masalah yang dihadapi.
- Benar-benar diperlukan masyarakat.
- Sesuai dengan kemampuan yang nyata dari swadaya masyarakat.
- Selesai dalam satu tahun anggaran.
- Dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh tenaga LKMD yang ada di desa.

3. Hadiah Lomba Desa.

Diberikan kepada desa yang telah menunjukkan prestasi tinggi selama satu tahun. Besarnya hadiah lomba desa, juara tingkat propinsi :

- Juara I sebesar Rp 5.000.000,-
 - Juara II sebesar Rp 4.000.000.-
 - Juara III sebesar Rp 3.000.000.-
- (Drs. Suwignjo, 1985 : 214).

4. Proyek Inpres (Instruksi Presiden).

Ada berbagai proyek Inpres yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa antara lain:

- Inpres Sekolah Dasar.
- Inpres penghijauan.
- Inpres sanijaga (sanitasi lingkungan dan jamban keluarga).

5. Pembinaan Administrasi Desa.

Oleh pemerintah pusat (Departemen dalam Negeri) Kepala desa diberikan bantuan untuk peningkatan administrasi desa.

Bantuan Kepala Desa Kritis mendapat prioritas dalam pembangunan. Bagi desa-desa tersebut dapat merupakan sumber pendapatan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan desa.

b. Sumber pendapatan dari pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pembinaan terhadap desa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Tingkat II. Dalam rangka meningkatkan desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan sumber keuangannya. Oleh karena itu dalam batas kemampuan Daerah kepada desa

diberikan bantuan tertentu, antara lain :

1. Kepala desa diberi oleh pemerintah daerah sebagian pajak atau retribusi sebagai sumber keuangan desa. Macam/jenis pajak yang diberikan kepada desa ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasar pada macam/jenis pajak yang menjadi wewenang Daerah.
2. Bantuan terhadap kepala desa dan perangkatnya dalam bentuk tambahan tunjangan penghasilan.
3. Bantuan untuk proyek-proyek desa, baik proyek bantuan desa atau proyek atas dasar swadaya murni masyarakat desa.

c. Sumber-sumber pendapatan dari pihak ketiga antara lain :

1. Pinjaman desa kepada Bank-bank.
2. Kepemimpinan kepala desa, untuk menggerakkan pemborong-pemborong atau orang terpandang di desa untuk memberikan partisipasinya dan kegiatan pemerintahan pemerintahan dan pembangunan.
3. Sumbangan dari koperasi, dan lain-lain.

(Drs. Suwignjo, 1985 : 216).

D. Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka sumber pendapatan merupakan permasalahan yang mendesak urgen yang memerlukan pemecahan dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya. Bagi desa yang baru statusnya berubah menjadi kelurahan, maka pengelolaan sumber-sumber beralih menjadi wewenang pemerintah daerah Tingkat II. Selanjutnya berdasar azas tugas pembantuan pengelolaan sumber-sumber dilaksanakan Pemerintah Kelurahan, namun dari pada sumber-sumber tersebut merupakan pendapatan bagi daerah Tingkat II yang bersangkutan. Sedang bagi desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri masalah yang dihadapi adalah :

1. Penggalian sumber pendapatan bagi desa yang sebelumnya tidak mempunyai sumber pendapatan asli.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan bagi desa yang sudah mempunyai sumber-sumber pendapatan, namun belum berarti. (Drs. Suwignjo, 1985 : 219).

Selanjutnya dalam rangka penggalian dan peningkatan atas sumber-sumber pendapatan desa, perlu dikemukakan hal-hal sebagai :

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Sebagaimana dikemukakan bahwa tidak semua desa mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan desa sendiri. Hal ini disebabkan :

- Sejak pembentukan desa tidak dilengkapi dengan sumber-sumber pendapatan.
- Hasil pemecahan dari desa lama menjadi beberapa desa baru dengan tidak disertai sumber pendapatan.

Untuk mengetahui penggalian jenis-jenis pendapatan asli desa dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kekayaan Desa.

Khusus yang menyangkut kekayaan desa, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dari tanah dapat diperoleh hasil yang memadai, sebagai sumber pendapatan desa. Namun tidak semua desa mempunyai tanah. Dalam hal demikian maka desa tidak mempunyai sumber pendapatan dari tanah. Ini berarti bahwa desa menghadapi kesulitan untuk membiayai/memberi tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya lebih-lebih untuk kegiatan rutin maupun pembangunan. Dengan demikian tanah mempunyai peranan yang penting sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu maka tanah desa perlu diadakan. Dalam hubungan ini maka pengadaan tanah dapat dilakukan melalui :

1. Kebijakan pembelian tanah bagi desa oleh pemerintah daerah, terutama dipergunakan desa yang tidak mampu.
2. Pembelian tanah melalui kredit dari pemerintah, yaitu kredit berjangka panjang dan lunak.
3. Tanah milik negara, pengolahan pertama dengan menggunakan bantuan desa.
4. Bagi desa-desa yang cukup luas, sebagian tanah dapat dipergunakan sebagai sumber pendapatan. Perolehan tanah adat (ulayat) menjadi tanah desa dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa di satu pihak dengan tokoh adat di lain pihak." (Drs. Suwignjo, 1985 : 220).

b. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa.

Apabila tanah tersebut tidak memungkinkan, keterbatasannya, maka sumber pendapatan dapat diperoleh melalui penggunaan swadaya partisipasi masyarakat, yaitu :

- "1. Penggunaan gotong royong masyarakat, namun tidak mengganggu kepentingan rakyat.
2. Substitusi gotong royong berupa penggantian tenaga yang dinilai dengan uang bagi yang tidak hadir pada waktu itu yang ditetapkan sesuai dengan jadwal gotong royong.
3. Sumbangan dari warga masyarakat desa dalam bentuk bahan hasil bumi dan lain-lain hasil musyawarah.
4. Lain-lain yang dapat digolongkan swadaya, partisipasi masyarakat." (Drs. Suwignjo, 1985 : 220).

c. Peningkatan Hasil Gotong Royong, antara lain :

- "1. Jalan Desa (retribusi bagi kendaraan besar yang masuk desa).
2. Penanaman pohon peneduh di pinggir jalan desa dan atau jalan yang di dalam pengawasan desa. Dengan tanaman produktif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penanaman tanah-tanah dengan sistem bagi hasil.
4. Pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan.
5. Kolam-kolam pembibitan ikan.
6. Kebun bibit unggul dengan izin bimbingan Dinas Pertanian.
7. Balai musyawarah desa apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
8. Bangunan desa.
9. Lapangan Olah Raga.
10. Tempat-tempat hiburan.
11. Tempat kramat yang ramai dikunjungi orang wisata." (Drs. Suwignjo, 1985 : 221)

d. Pungutan Desa.

Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya jenis pungutan yang merupakan sumber pendapatan ditetapkan dengan peraturan Daerah Tingkat I dan peraturan Daerah Tingkat II. Peraturan daerah yang mengatur pungutan pada sebagian besar daerah yang belum dilakukan merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982. Tentang Pungutan Desa. Namun pada beberapa desa telah melakukan pungutan sebagai sumber keuangan desa, dengan jenis pungutan sebagai berikut :

1. Pas jalan.
2. Keterangan berkelakuan baik.
3. Keterangan bebas G. 30 S/PKI.
4. Keterangan Dukah.
5. Keterangan pemilikan tanah.
6. Keterangan penduduk sementara.
7. Kartu Penduduk.
8. Keterangan pindah.
9. Keterangan lahir.
10. Izin bangunan.
11. Izin keramaian.
12. Pengesahan surat-surat keterangan.
13. Sewa bangunan. (Drs. Suwignjo, 1985 : 222).

e. Usaha Yang Sah.

Usaha yang sah terutama diarahkan pada hasil proyek-proyek yang dibangun melalui Bantuan Pembangunan Desa. Banyak proyek yang telah dibangun namun belum memanfaatkan secara maksimal terutama untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan desa.

Proyek-proyek bantuan pembangunan desa yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Prasarana produksi seperti :
 - a. Pengairan desa.
 - b. Proyek peternakan.

- c. Proyek pembibitan.
- d. Proyek listrik desa.
- 2. Prasarana pemasaran seperti :
 - a. Pasar desa.
 - b. Toko dan kios desa.
 - c. Wisma dan penginapan desa.
- 3. Prasarana perhubungan seperti :
 - a. Retribusi terhadap jalan desa bagi kendaraan besar.
 - b. Jembatan penyeberangan desa.
 - c. Terminal dan pangkalan kendaraan.
- 4. Prasarana Sosial seperti :
 - a. Bangunan air bersih desa.
 - b. Gedung-gedung/bangunan untuk pertunjukan. (Drs. Suwignjo, 1985 : 223).

2. Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat.

Sebagaimana disebutkan di atas sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah Pusat dan Daerah, ada berbagai jenis, namun demikian sumber tersebut dapat digolongkan :

- 1). Sumber bantuan berbentuk proyek.
- 2). Sumber yang non proyek, yaitu merupakan sebagian proyek dan retribusi yang diberikan kepada desa.

Sumber Pemerintah non proyek yaitu sesuai dengan fungsinya Pemerintah Daerah Tingkat II bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan terhadap pemerintah desa, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memberi bantuan kepada desa.

Bantuan tersebut dikaitkan dengan tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh desa misalnya tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Dalam

hubungan ini sumber yang digali dari pemerintah tingkat lebih atas adalah :

- "1. Tambahan/subsidi/tunjangan/ganjaran kepala desa untuk tambahan biaya kepala desa dan perangkatnya dengan standar minimal penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkatnya desa ditetapkan :

a. Kepala desa	Rp. 60.000.-
b. Sekretaris desa	Rp. 50.000.-
c. Kepala urusan	Rp. 40.000.-
d. Kepala urusan-	Rp. 40.000.-

 dapat terpenuhi.
2. Peningkatan sarana administrasi dalam bentuk penyeragaman register-register desa dan peralatan yang sudah diperoleh di desa."
(Drs. Suwignjo, 1985 : 225).

E. Struktur dan Mekanisme Anggaran Desa

1. Struktur anggaran desa.

Pemahaman atas beban tugas yang diemban dalam mewujudkan misi yang ingin dicapai merupakan syarat mutlak untuk menyusun struktur anggaran yang tepat dan tuntas dan tidak terdapat celah-celah yang memungkinkan suatu kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan. Telah diketahui bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan banyak dituntut untuk memenuhi keinginan-keinginan dan ketentuan masyarakat.

Keinginan dan kebutuhan merupakan pedoman atau pertimbangan dalam menyusun anggaran yang ditugaskan dalam kegiatan rutin dan pembangunan.

Dalam menyusun anggaran rutin dan pembangunan desa dijabarkan dalam bentuk anggaran yang berstruktur, artinya ada hubungan jalin-menjalin antara unsur-unsur

atau kegiatan pembentuk struktur dan lingkup tugas dan fungsi satuan-satuan (unit organisasi pemerintah desa). Meskipun demikian dapat diperlihatkan dengan jelas antara kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun anggaran adalah anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran sedapat mungkin seimbang namun luwes apabila terjadi perubahan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, tentang penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) atau disingkat Anggaran Desa. Anggaran pengeluaran tersebut Anggaran Belanja Desa.

Anggaran belanja adalah suatu alat penting bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya baik kegiatan maupun pembangunan. Anggaran Belanja Desa merupakan alat bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, bukan saja merupakan kebijaksanaan kepala desa tetapi merupakan kebijaksanaan pemerintah desa karena kas lebih dahulu dimusyawarahkan dalam LKMD, dan selanjutnya mendapat pengesahan dari Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Struktur Anggaran Desa telah ditetapkan berdasar Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, yang terdiri dari anggaran rutin dan Anggaran pembangunan yang masing-masing terpisah namun dalam satu kesatuan Anggaran. Anggaran rutin dapat dibagi dengan dua bagian

yaitu : Bagian I mengenai penerimaan, bagian ke II mengenai pengeluaran.

Adapun struktur anggaran sebagai berikut :

- "a. Anggaran rutin mengenai penerimaan dibagi dalam tujuh Pos yaitu :
1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu;
 2. Pos II, Pendapatan asli desa;
 3. Pos III, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Pusat;
 4. Pos IV, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 5. Pos V, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 6. Pos VI, Penerimaan berasal dari pajak dan retribusi yang diserahkan kepada desa;
 7. Pos VII, Lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggaran rutin mengenai pengeluaran terdiri dari 6 Pos :
1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu.
 2. Pos II, Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, kepala dusun, dan staf perangkat desa.
 3. Pos III, Pembiayaan alat tulis menulis kantor.
 4. Pos IV, Pembiayaan pendidikan milik desa.
 5. Pos V, Perjalanan dinas.
 6. Pos VI, Lain-lain." (Drs. Suwignjo, 1985 : 236-237).

Sama halnya dengan anggaran rutin, anggaran pembangunan juga terdiri dari 2 bagian yaitu bagian penerimaan

- a. Bagian anggaran penerimaan pembangunan terdiri dari 7 pos yang sama dengan pos-pos penerimaan rutin. Keadaan ini memerlukan penjelasan atau perincian lebih lanjut dan perlu perincian sumber-sumbernya.
- b. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari 7 pos :
 1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu.
 2. Pos II, Pembangunan prasarana pemerintahan desa.
 3. Pos III, Pembangunan prasarana perhubungan.
 4. Pos IV, Pembangunan prasarana produksi.
 5. Pos V, Pembangunan prasarana pemasaran.
 6. Pos VI, Pembangunan prasarana sosial.
 7. Pos VII, Pembangunan lain-lain. (Drs. Suwignjo, 1985 : 237).

Pos-pos tersebut tampak bahwa penekanan pembangunan diarahkan pada aspek fisik dan menyangkut tata ruang. Hal ini kurang sesuai dengan perkembangan. Tidak dapat menampung program nasional yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat desa, khususnya menyangkut 8 sukses. Demikian pula program-program non fisik yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Mekanisme Anggaran Desa.

a. Anggaran desa disusun oleh pemerintah desa, besarnya sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran itu. Kegiatannya meliputi kegiatan rutin pembangunan. Jenis kegiatan rutin menyangkut masalah yang berhubungan dengan aparatur ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan rapat-rapat, dan hubungan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan menyangkut masalah berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan ketenteraman dan ketertiban. Rencana-rencana kegiatan tersebut disusun oleh urusan-urusan bagi kegiatan rutin dan oleh LKMD, bagi kegiatan pembangunan sesuai dengan kegiatan 10 seksi LKMD.

b. Agar anggaran desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga desa, sebelum penyusunan RAPPKD dilakukan oleh Kepala Desa, sesuai dengan adat setempat beserta LMD, LKMD dan perangkat desa. Masukan-masukan yang timbul, tumbuh dan berkembang merupakan bahan masukan

dan penyusunan RAPPKD. Pada umumnya masalah yang dibahas dalam rapat adalah :

1. Sumber-sumber pendapatan desa (rutin dan pembangunan).
 2. Anggaran belanja desa meliputi anggaran rutin dan pembangunan.
 3. Masalah lain dalam bentuk informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
- c. Anggaran merupakan batas kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan warga desa dalam suasana aman dan tenteram. Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan maka pengawasan perlu dilakukan terhadap jalannya pembangunan desa dengan mendeteksi struktur dan mekanisme anggaran. Pengawasan preventif pengesahan kepala desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Luas Desa Pitue

Desa Pitue salah satu Desa dari enam Desa yang ada di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan. Luas Desa Pitue adalah 2.280 ha / 5,65 Km². Kepadatan penduduk sekitar 42 jiwa/km². Secara administratif Desa Pitue mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamangapa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto-Bonto dan Talaka.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pitusunggu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ma'rang.

Dengan melihat Desa Pitue tersebut dapat memberi gambaran bahwa Desa Pitue dalam perkembangannya dapat saling mempengaruhi dengan beberapa Desa lainnya yang ada di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

Berdasarkan luas Desa Pitue tersebut di atas terdapat tiga dusun.

2. Bentuk dan Keadaan Tanah

Desa Pitue mempunyai bentuk dan keadaan tanah sebagaimana Desa lainnya yang ada di Kecamatan Ma'rang yaitu sebagian dataran dan sebagian bergunung-gunung

agak kemerah-merahan yang cocok untuk lahan perkebunan sedangkan dataran rendahnya ditutupi dengan tanah yang agak kehitam-hitaman yang dapat dijadikan sebagai lahan persawahan. Keadaan tanah Desa Pitue jika dilihat dari kesuburan tanahnya termasuk dikategorikan "cukup" dengan tanah yang seperti ini memungkinkan untuk dikembangkan daerah perkebunan. Untuk mengetahui areal persawahan dan perkebunan Desa Pitue dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Luas Areal Persawahan dan Perkebunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Dati II Pangkajene Kepulauan

NO.	JENIS AREAL	LUAS (HA)	PROSENTASE
1.	Persawahan	570	91,6 %
2.	Perkebunan	52	8,4 %
	Jumlah	622	100,0 %

3. Hidrologi

Keadaan hidrologi Desa Pitue pada prinsipnya amat tergantung pada keadaan curah hujan. Curah hujan di Desa Pitue tidak berbeda jauh dengan Desa yang ada di Kecamatan Ma'rang pada khususnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene pada umumnya, yaitu rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun. Curah hujan seperti ini turun sekitar Bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Bulan inilah curah hujan yang paling banyak.

Pada bulan ini penduduk Desa Pitue atau petani pada khususnya sibuk mengerjakan tanahnya untuk tanaman padi sebagai sumber penghasilan yang paling utama.

B. Keadaan Demografis

1. Keadaan Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Komposisi penduduk Desa Pitue menurut umur dan jenis kelamin kelihatannya berbeda-beda. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1993/1994

NO.	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		%
		LK	PR	
1.	0 - 4	199	257	15,25
2.	5 - 14	282	281	22,18
3.	15 - 25	263	334	19,97
4.	26 - 54	576	396	32,60
5.	55 - Ke atas	995	206	10,00
JUMLAH		1249	1280	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Tahun 1993

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan penduduk Desa Pitue dilihat dari jenis kelamin jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki yaitu jumlah laki-laki 1249 orang sedangkan perempuan berjumlah 1280 orang. Apabila dilihat dari

kelompok umur maka penduduk desa Pitue terbesar kepada angkatan kerja yaitu antara umur 20 sampai 54 tahun, dan jumlah penduduk yang berada pada usia anak-anak dan lanjut usia menunjukkan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan kelompok kerja (produktif).

2. Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting artinya dalam kehidupan. Dengan melalui pendidikan maka salah satu tujuan nasional dapat dicapai yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu pendidikan juga mempunyai manfaat dan peranan yang sangat penting terhadap bidang lainnya, dalam arti bahwa kegiatan di bidang pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan pemerintahan dan pembangunan di tingkat pedesaan. Untuk mengetahui keadaan penduduk Desa Pitue jika dilihat dari tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel 3

Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di
Desa Pitue Kecamatan Ma'rang tahun 1993/1994

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	380	12,71
2.	Tidak Tamat SD/ sederajat	290	9,70
3.	Tamat SD/ sederajat	1.360	45,50
4.	Tamat SLP/ sederajat	603	20,18
5.	Tamat SLTA/ sederajat	255	8,53
6.	Akademi	51	1,71
7.	Perguruan Tinggi	50	1,67
8.	Buta Aksara	-	-
Jumlah		2.989	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Tamatan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dengan jumlah 1.360 orang (45,50%) sedangkan penduduk yang buta aksara sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena pemerintah telah menggalakkan program pemerintah yaitu "Kejar Paket A" bagi mereka yang belum tahu membaca.

Apabila dilihat secara keseluruhan, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa tingkat pendidikan di Desa Pitue sudah dianggap memadai atau cukup.

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian dimaksud-

kan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebagai sumber pendapatan mereka.

Penduduk desa Pitue mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Pada umumnya mereka hidup dari sektor pertanian seperti bertani, berkebun dan berladang, disamping itu sebagian penduduk bekerja di bidang pemerintahan, ABRI maupun sipil. Adapun jenis mata pencaharian dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Tahun 1993

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	Pertanian	979	82,00
2.	Pegawai	109	9,13
3.	Nelayan	54	4,52
4.	Pedagang	23	1,92
5.	ABRI	17	1,42
6.	Tukang	12	1,00
Jumlah		1.194	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk desa Pitue yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian sebanyak 979 orang atau 82,00%, Pegawai 109 orang atau 9,13%, Nelayan 54 orang atau 4,52%, Pedagang 23 orang atau 1,92%, ABRI 17 orang atau 1,42% dan yang paling sedikit adalah Tukang 12 orang atau 1,00%.

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pendidikan

Suatu kenyataan bahwa pendidikan tanpa suatu proses pengajaran akibatnya tidak akan tercapai kedewasaan hidup yang sebaik mungkin dalam upaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari apa yang telah ada ialah dengan jalan memajukan sistem pendidikan yang berorientasi ke masa depan atau dengan menguasai teknologi dalam rangka menggali potensi desa.

Oleh karena itu pentingnya sarana pendidikan untuk menampung usia sekolah, maka pemerintah senantiasa membantu sarana pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. Adapun sarana pendidikan di desa Pitue dapat melihat tabel di bawah ini :

Tabel 5

Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan di
Desa Pitue kecamatan Ma'rang 1993

NO.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	1	Baik
2.	Sekolah Dasar (SD)	4	Baik
3.	Sekolah Lanjutan Pertama	1	Baik
Jumlah		6	

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa sarana pendidikan, khususnya Sekolah Dasar sudah cukup jika dibandingkan dengan jumlah anak sekolah. Dari jumlah Sekolah Dasar (SD) tersebut 3 (tiga) berupa Inpres dan 1 (satu) buah non Inpres. Demikian pula halnya Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) sudah memadai karena dapat menampung anak yang telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar, sedangkan Sekolah Lanjutan Atas, belum ada sehingga tamatan SMP yang akan melanjutkan pendidikannya, ia harus keluar desa dengan menempuh jarak 1 sampai 2 Km.

b. Sarana Kesehatan

Disadari bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan jalan pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Masalah kesehatan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Walaupun dalam hal ini sangat diharapkan kepada masyarakat untuk turut secara aktif di dalamnya. Adapun sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pitue dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6

Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Desa Pitue

NO.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Ket
1.	Puskesmas	1 buah	Baik
2.	Posyandu	2 buah	Baik
3.	Dokter	1 orang	Aktif
4.	Bidan	2 orang	Aktif
5.	Mantri Kesehatan	3 orang	Aktif
6.	Lain-lain	2 orang	Aktif
Jumlah		11 orang	

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

c. Sarana Keagamaan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" memberi arti bahwa faktor agama/keyakinan/kepercayaan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menciptakan kehidupan yang aman perlu dibina toleransi antar umat beragama secara nyata, hal ini dengan adanya sarana keagamaan (peribadatan) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya penduduk Desa Pitue memeluk agama Islam dan termasuk penganut yang taat beribadat, sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen hanyalah pendatang yang menetap di desa Pitue. Adapun jumlah yang memeluk agama Islam

sejumlah 2.981 orang atau 99,73%, sedangkan memeluk agama Kristen Protestan hanya 8 orang atau 0,27%. Untuk mengetahui sarana keagamaan dapat diketahui pada tabel di bawah ini :

Tabel 7

Jumlah dan Jenis Sarana Keagamaan
Desa Pitue Kecamatan Ma'rang

NO.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	4 buah	Baik
2.	Surau	1 buah	Baik
3.	Gereja	Tidak ada	-
		Jumlah :	5 buah

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Tabel di atas menggambarkan bahwa sarana ibadah yang ada di tabel di atas hanya berupa mesjid dan surau sedangkan sarana ibadah lainnya tidak ada.

d. Sarana Produksi dan Pemasaran

Sarana produksi salah satu faktor yang memperlancar jalannya roda perekonomian di desa. Sarana produksi merupakan nilai tambah keuangan desa. Sarana itu berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

Adapun sarana pemasaran dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 8

Jumlah dan Jenis Sarana Pemasaran di
Desa Pitue Kecamatan Ma'rang

NO.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar Umum	1	Baik
2.	Kios / warung	4	Baik
3.	Toko	14	Baik
Jumlah :		19	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

e. Sarana perhubungan

Untuk mendukung lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan perlu didukung sarana perhubungan dalam hal berupa jalan kendaraan darat. Adapun saran perhubungan terbagi atas dua yaitu : jalan propinsi dan jalan desa. Untuk mengetahui sarana tersebut dapat dilihat tabel :

Tabel 9

Jumlah dan jenis sarana perhubungan
di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang

NO.	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan Propinsi	1	Baik
2.	Jalan desa	2	Baik
3.	Jembatan	2	Baik
4.	Mobil	15	Baik
5.	Motor	49	Baik
Jumlah :		69 buah	

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Berdasarkan tabel di atas, sarana perhubungan yang ada sudah memadai. Adapun sarana jalan desa masih dalam tahap perbaikan.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana teori yang mengemukakan bahwa organisasi adalah tata kerja dan tata hubungan kerja antar kelompok yang masing-masing memegang fungsi dan posisi yang harus dijalankan.

Dalam rangka mencapai tujuan desa secara Nasional dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan. Struktur Pemerintahan desa terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :

1. Unsur Pimpinan, yaitu :
 - a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
2. Unsur Pelayanan, yaitu :
 - a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Urusan
3. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Dusun

Untuk mengetahui tata pembagian dan hubungan kerja bagi unit pemerintahan desa maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan dan unit pelaksana pemerintahan desa.

Sesuai dengan kedudukan tersebut, kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, menumbuhkan serta meningkatkan semangat gotong royong sebagai sendi utama.

Kepala Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan urusan rumah tangga, mengarahkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Lembaga Musyawarah Desa berkedudukan sebagai wadah penyelenggaraan permusyawaratan masyarakat yang ada di desa.

Dalam kedudukan tersebut, lembaga ini bertugas untuk menampung masukan dari masyarakat dan berfungsi sebagai menyampaikan bahan masukan tersebut kepada Kepala Desa dan membina hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf ketatausahaan kepada Kepala Desa dan memimpin sekretaris desa.

Tugas Sekretaris Desa adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketatausahaan.

Sedangkan keberadaan Sekretaris Desa adalah untuk melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan bertugas melaksanakan urusan keuangan, administrasi serta melaksanakan tugas Kepala Desa bilamana Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

4. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa untuk memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidangnya.

Sehubungan dengan hal itu Kepala Urusan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Sehubungan dengan itu Kepala Dusun mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemerintahan desa.

Di pihak yang sama Kepala Dusun mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dalam melaksanakan keputusan Kepala Desa dan melaksanakan kegiatan lainnya yang ada di wilayah kerjanya.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Seperti diketahui bersama bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu ditetapkan tujuan kemudian rencana untuk mencapai suatu tujuan itu.

Perencanaan merupakan suatu hal yang penting sebelum memulai suatu pekerjaan sebab dari perencanaan inilah kita bertolak untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk itulah dalam pengelolaan sumber pendapatan desa ini perlu direncanakan mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, kapan waktu pelaksanaannya dan sebagainya. Dengan didahului suatu perencanaan yang matang, maka hasil yang akan diperoleh nanti akan memuaskan baik bagi pelaksanaan maupun bagi masyarakat, sebab dengan merencanakan terlebih dahulu berarti memikirkan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan penentuan sumber-sumber pendapatan desa, masing-masing kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkatnya membuat konsep rencana sumber-sumber pendapatan desa, kemudian konsep ini diajukan dalam suatu rapat desa bersama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam rapat inilah konsep tersebut dibahas, setelah mendapat persetujuan dari rapat desa maka rencana tersebut sudah merubah menjadi keputusan

desa yang ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris, dan Lembaga Musyawarah Desa kemudian diserahkan kepada Camat untuk diketahui dengan dilampiri daftar hadir anggota rapat dan risalah rapat.

Rapat desa untuk masing-masing desa tidak dilakukan secara bersamaan, tergantung dari desa masing-masing, tetapi dalam peraturan telah ditetapkan bahwa proses penetapan suatu keputusan yang menyangkut masalah anggaran ataupun pembiayaan dilakukan pada awal tahun anggaran yaitu pada bulan April setiap tahun.

Apabila konsep keputusan Kepala Desa Pitue telah diterima dan diketahui oleh camat Kecamatan Ma'rang, maka konsep tersebut diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan untuk mendapatkan pengesahan. Proses pengesahan keputusan desa ini selambat-lambatnya 30 hari harus sudah mendapat pengesahan atau penolakan dari pejabat yang berwenang.

Keputusan Kepala Desa Pitue yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan akan dikirim kembali kepada Kepala Desa Pitue melalui camat Kecamatan Ma'rang untuk dilaksanakan.

Setelah penulis melihat keputusan desa, ternyata dalam pembuatan konsep rencana keputusan desa pada umumnya sama, beberapa hal yang berbeda (tergantung dari banyaknya obyek di desa).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan Desa Pitue yang direncanakan akan diperoleh dari dua macam sumber yaitu :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari :
 - a. Hasil kekayaan desa yaitu tanah milik desa.
 - b. Swadaya masyarakat yaitu sumbangan cuma-cuma dari masyarakat.
 - c. Gotong-royong masyarakat desa yaitu pelaksanaan pembangunan oleh setiap masyarakat desa.
 - d. Pungutan resmi desa yaitu pengambilan surat-surat di kantor desa atau penggunaan jalan swadaya masyarakat desa.
 - e. Pendapatan lain-lain yaitu usaha-usaha ekonomi desa.
2. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah Tingkat II yang terdiri dari :
 - a. Bantuan pembangunan Desa Pitue yang bersumber dari APBN.
 - b. Pemberian dari pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berupa tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkatnya.
 - c. Sebagian dari pajak dan restribusi daerah yang diserahkan kepada Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang.
 - d. Bantuan Inpres berupa :
 - Bantuan penghijauan.
 - Bantuan sarana kesehatan (MCK).
 - Bantuan pasar Desa Pitue.

Semua obyek di atas merupakan sumber pendapatan Desa Pitue untuk dilaksanakan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang ada di Desa Pitue.

Pada tabel berikut ini kita melihat sumber pendapatan Desa Pitue di Kecamatan Ma'rang 1988/1989-89/90-90/91.

Tabel 10

Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue
Kecamatan Ma'rang Tahun 1991/1992

NO.	Jenis Variabel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A.	<u>Pendapatan Asli Desa</u>		
1.	Kekayaan Desa	950.000	860.000
2.	Swadaya Masyarakat	957.000	1.145.000
3.	Gotong Royong	1.460.000	1.250.000
4.	Pungutan Desa	860.000	825.000
5.	Lain-lain	1.000.000	750.000
	Jumlah	5.227.000	4.830.000
B.	<u>Bukan Pendapatan Asli Desa</u>		
1.	Bantuan Pembangunan Desa	2.500.000	2.000.000
2.	Sumbangan dari pemerintah:		
	a. Tingkat I	5.000.000	4.450.000
	b. Tingkat II	1.500.000	500.000
3.	Pajak dan Retribusi	1.500.000	950.000
4.	Bantuan Inpres:		
	a. Penghijauan	1.750.000	1.000.000
	b. Sarana Kesehatan	1.200.000	950.000
	c. Sarana Pendidikan	1.000.000	750.000
	Jumlah	14.450.000	10.600.000

Sumber Data : Kantor Desa Pitue, 1993

Dari tabel tersebut dapat kita lihat penerimaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang tahun 1991/1992 baik dari pendapatan asli Desa Pitue maupun bukan pendapatan asli Desa Pitue.

Dalam tabel tersebut sumber pendapatan Asli Desa Pitue yaitu secara garis besarnya dipungut 5 (lima) macam obyek yaitu kekayaan desa dengan target penerimaan Rp 950.000,- swadaya masyarakat dengan target penerimaan Rp 957.000,- gotong royong dengan target penerimaan Rp 1.460.000,- pungutan Desa Pitue dengan target penerimaan Rp 860.000.- dan pungutan lain-lain dengan target penerimaan Rp 1.000.000.- Dengan melihat target penerimaan tahun 1991/1992, maka yang besar adalah hasil gotong royong masyarakat Desa Pitue. Hal ini memang wajar karena salah satu ciri masyarakat Desa adalah nilai gotong royong yang sangat tinggi. Adapun target penerimaan keseluruhan sumber pendapatan Asli Desa adalah Rp 5.227.000,-

Sumber-sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli Desa terdapat pula dalam tabel tersebut di atas. Adapun sumber penerimaan yang bukan pendapatan Asli Desa Pitue adalah bantuan pembangunan Desa Pitue dengan target penerimaan Rp 2.500.000.- sumbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat I sebanyak Rp 5.000.000,- sedangkan Daerah Tingkat II dengan target penerimaan Rp 1.500.000.- sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada Desa Pitue dengan target penerimaan Rp 1.500.000.- kemudian Inpres yang

terdiri dari bantuan penghijauan dengan target Rp 1.750.000,- bantuan sarana kesehatan dengan target penerimaan Rp 1.200.000,- dan sarana pendidikan sebesar Rp 1.000.000,-. Adapun jumlah target keseluruhan yang bukan pendapatan Asli Desa Pitue adalah sebesar Rp 14.450.000,-.

Dalam tabel tersebut tampak realisasi sumber-sumber pendapatan Asli Desa Pitue maupun bukan pendapatan Asli Desa Pitue pada tahun 1991/1992. Adapun realisasi dari masing-masing sumber pendapatan adalah kekayaan Desa Pitue dengan realisasi penerimaan Rp 860.000,- swadaya masyarakat dengan realisasi penerimaan Rp 1.145.000,-, gotong royong masyarakat Desa Pitue dengan realisasi penerimaan Rp 1.250.000,-, pungutan resmi Desa Pitue dengan realisasi penerimaan Rp 825.000,-, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain Desa Pitue dengan realisasi target penerimaan Rp 750.000,-. Adapun jumlah keseluruhan realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan Asli Desa Pitue adalah sebanyak Rp 4.830.000,-.

Dengan memperhatikan hal tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa yang paling mendekati target penerimaan adalah gotong royong masyarakat Desa Pitue, kemudian swadaya masyarakat Desa melebihi target, lalu menyusul pungutan Desa, kemudian kekayaan Desa Pitue dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain.

Realisasi yang bukan Sumber Pendapatan Asli Desa terlihat dalam tabel tersebut dari masing-masing sumber

pendapatan adalah bantuan pembangunan Desa Pitue dengan realisasi penerimaan Rp 2.000.000.- sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I sebanyak Rp 4.450.000.- sedangkan Daerah Tingkat II dengan realisasi penerimaan Rp 500.000.-. Adapun pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada Desa Pitue dengan realisasi penerimaan Rp 950.000.-, kemudian bantuan Inpres yang terdiri dari bantuan penghijauan dengan realisasi penerimaan Rp 2.000.000.-, dan bantuan sarana kesehatan dengan realisasi penerimaan Rp 950.000.-, yang terakhir adalah realisasi penerimaan dari bantuan sarana pendidikan sebanyak Rp 750.000.-.

Berdasarkan uraian mengenai realisasi yang bukan pendapatan Asli Desa Pitue tersebut maka peneliti dapat menjelaskan bahwa hampir semua yang bukan pendapatan Asli Desa Pitue dapat mencapai target. Hal ini memang wajar karena rata-rata sumber pendapatan tersebut merupakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tidak melakukan lagi pengelolaan untuk memperolehnya.

Kemudian dengan memperhatikan pula bahwa peneliti dapat membandingkan antara sumber pendapatan Asli Desa dan bukan pendapatan Asli Desa, maka yang paling tinggi penerimaannya adalah pendapatan yang bersumber dari yang bukan pendapatan Asli Desa Pitue.

Berikut ini peneliti tampilkan tanggapan responden mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan.

Tabel 11

Tanggapan Responden Atas Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue

NO.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat Memuaskan	5	11,11
2.	Memuaskan	12	26,67
3.	Cukup Memuaskan	25	55,55
4.	Tidak Memuaskan	3	6,67
	Jumlah	45	100,00

Sumber : Hasil Pengelolaan Kusioner, 1993

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue pada tabel tersebut di atas bahwa yang menyatakan sangat memuaskan sebanyak 5 orang atau 11,11 %, sedangkan yang menyatakan memuaskan adalah 12 orang atau 26,67 %, dan yang berpendapat cukup memuaskan 25 orang atau 55,55 %, yang berikut mengutarakan tidak memuaskan berjumlah 3 orang atau 6,67 %.

Konklusi dari proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue adalah cukup memuaskan.

B. Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue Dalam Pembangunan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 dijelaskan bahwa penggunaan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa.

Setiap tahun pemerintah Desa Pitue selalu merencanakan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa untuk digunakan dalam membiayai segala kegiatan pembangunan di Desa Pitue. Pemanfaatan pendapatan Desa Pitue tersebut dituangkan dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan Desa. Belanja rutin memuat pengeluaran Desa Pitue digunakan dalam membiayai tugas pemerintah Desa Pitue sehari-hari, sedang belanja pembangunan memuat semua biaya guna menutupi pengeluaran pemerintah Desa Pitue dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik maupun non fisik.

Tabel

Distribusi Pengeluaran Keuangan Desa Pitue
Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II
Pangkajene. Kepulauan

NO.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Prosentase	Sumber Biaya
A. Rutin				
1.	Honor kepala desa dan perangkatnya	2.300.000	17,11	Bantuan pemerintah daerah tingkat I dan II
2.	Biaya administrasi desa	250.000	1,86	Pendapatan asli desa
3.	Biaya pemeliharaan	750.000	5,58	Pendapatan asli desa
4.	Biaya perjalanan dinas	725.000	5,40	Pendapatan asli desa
5.	Biaya lain-lain	250.000	1,86	Pendapatan asli desa
B. Pembangunan				
1.	Prasarana fisik pemerintah desa	4.750.000	35,33	Bantuan pusat + pendapatan asli desa
2.	Prasarana produksi	550.000	4,10	Bantuan Inpres
3.	Prasarana perhubungan	620.000	4,62	Bantuan pusat
4.	Prasarana sosial	2.500.000	18,60	Bantuan Inpres
5.	Pembangunan lain-lain Desa Pitue	750.000	5,58	Bantuan pusat
Jumlah		13.445.000	100,00	

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, 1993

Melihat tabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang tersebut, dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Pada pengeluaran rutin dapat kita lihat bahwa belanja atau honor Kepala Desa dan perangkatnya pengeluaran yang paling banyak yaitu 17,11% dan yang paling kecil adalah biaya pemeliharaan dan lain-lain yaitu 1,86%. Besarnya pengeluaran masing-masing obyek di atas untuk setiap tahun tidak sama, terutama untuk obyek yang dananya berasal dari pendapatan Asli Desa Pitue, sebab kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh Desa Pitue tidak tetap, tergantung dari besarnya partisipasi masyarakat. Bahkan dalam satu tahun anggaran biasanya ada obyek yang tidak mendapat dana karena tidak diperoleh dari pendapatan Asli Desa Pitue.
- b. Pada pengeluaran pembangunan dapat kita lihat bahwa pengeluaran untuk pembangunan prasarana fisik pemerintah Desa Pitue merupakan pengeluaran yang paling besar sebanyak 35,33% kemudian pembangunan menyusul pembangunan prasarana sosial sebanyak 18,60% kemudian pembangunan prasarana perhubungan sebanyak 4,61% dan pembangunan lain-lain sebanyak 5,58% dan yang paling kecil adalah prasarana produksi sebanyak 4,10%.

Belanja pembangunan memang tidak sama dengan belanja rutin yang harus ada setiap tahun anggaran, karena merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa

Pitue dan juga bukan berarti bahwa pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Sebab bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat selalu menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan hidup, untuk itulah pembangunan perlu dilaksanakan apabila dana tersedia untuk itu.

Pembangunan yang sering dilaksanakan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Adapun pembangunan fisik yang telah dilaksanakan berdasarkan penerimaan dari sumber pendapatan Desa Pitue pada tahun anggaran 1991/1992 adalah pembangunan Kantor Desa Pitue, pembuatan Balai Pertemuan Masyarakat, pos ronda, sedangkan pembangunan non fisik yang telah dilaksanakan adalah penyuluhan kesehatan, yang menyangkut kesehatan anak dan ibu, kemudian kegiatan lain yang sering dilaksanakan adalah pekan olahraga Desa dan Musabaqatilawatil Quran.

Hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat akan tetapi dinikmati secara merata di berbagai desa atas dasar sistem skala prioritas yaitu bahwa proyek yang dibangun harus benar-benar diperlukan di dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Biaya dari Inpres Desa Pitue yaitu berupa pembangunan prasarana produksi berupa pembelian benur dengan harapan agar hasil tambak dapat menambah sumber pendapatan Desa Pitue.

2. Biaya dari sumber pendapatan Asli Desa Pitue dari bantuan pusat dan bantuan Inpres yakni :

a. Pembangunan prasarana fisik pemerintah yang terdiri dari :

- Rehabilitasi pembangunan kantor desa,
- Rehabilitasi kantor Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,
- Rehabilitasi Balai Pertemuan Masyarakat,
- Pembuatan Pos Ronda.

b. Pembangunan di bidang prasarana sosial yaitu :

- Rehabilitasi Mesjid,
- Pembangunan sekolah,
- Pembangunan pintu gerbang.

c. Pembangunan prasarana perhubungan yang terdiri dari :

- Rehabilitasi jalan sepanjang 5 kilometer,
- Pembuatan jembatan 2 buah,
- Pembuatan dekker sebanyak 4 buah.

d. Pembangunan lain-lain antara lain :

- Pembinaan generasi muda,
- Pelaksanaan kegiatan PKK,
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Desa,
- Musabaqa tilawatil Quran.

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue dari berbagai jenis pembangunan, dapat dipenuhi sebagian tetapi belum seluruhnya kebutuhan pembangunan tersebut yang tersedia baik bantuan pemerintah maupun pendapatan Asli Desa Pitue.

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue kita dapat melihat beberapa pendapat responden yang berhasil penulis wawancarai :

Tabel 13

Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue
di Bidang Prasarana Fisik

NO.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Rehabilitasi pembangunan Kantor Desa	2.250.000	47,37
2.	Rehabilitasi kantor LKMD	700.000	14,74
3.	Rehabilitasi Balai Pertemuan Masyarakat	1.250.000	26,32
4.	Pembuatan Pos ronda	550.000	11,58
	Jumlah	4.750.000	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, 1993

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber pendapatan desa di bidang prasarana fisik pemerintah Desa Pitue cukup baik berdasarkan pendapat responden yang mengatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ini, hasilnya sesuai yang telah dilaksanakan (biaya yang dikeluarkan telah dimanfaatkan seluruhnya dengan baik).

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue di bidang prasarana sosial dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14

Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue
di Bidang Prasarana Sosial

NO.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Rehabilitasi Mesjid	970.000	38,80
2.	Pembangunan sekolah	965.000	38,60
3.	Pembangunan pintu gerbang	565.000	22,60
	Jumlah	2.500.000	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, 1993

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Asli Desa Pitue tersebut sudah dimanfaatkan seluruhnya sesuai dengan perkiraan biaya semula dalam arti biaya yang telah dimanfaatkan sesuai dengan biaya sebenarnya (adanya kesesuaian antara distribusi pengeluaran keuangan dengan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan di bidang prasarana sosial).

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue pada bidang prasarana perhubungan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15

Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue
di Bidang Prasarana Perhubungan

NO.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Rehabilitasi jalan	175.000	28,23
2.	Pembuatan jembatan	345.000	55,65
3.	Pembuatan dekker	100.000	16,13
Jumlah		620.000	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, 1993 .

Berdasarkan tabel 14 di atas, diterangkan dengan jelas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue di bidang prasarana perhubungan telah menelan biaya Rp 620.000.- sesuai dana yang telah disediakan berdasarkan distribusi pengeluaran keuangan (tabel 11). Pada pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue di bidang prasarana perhubungan menyelesaikan tiga jenis kegiatan yang terdiri dari : rehabilitasi jalan sebanyak 28,23%, pembuatan jembatan sekitar 55,65% dan pembuatan dekker menelan biaya sekitar 16,13%.

Sedangkan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Desa Pitue pada pembangunan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16

Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pitue
Pada Pembangunan Lain-Lain

NO.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Pembinaan generasi muda	225.000	30,00
2.	Pelaksanaan kegiatan PKK	125.000	16,67
3.	Pekan olahraga desa	150.000	20,00
4.	Musabbakah Tilawatil Qur'an	250.000	33,34
	Jumlah	750.000	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, 1993

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue di bidang pembangunan lain-lain telah dimanfaatkan sesuai proporsinya. Dengan demikian, nampak dengan jelas adanya kesesuaian antara distribusi pengeluaran keuangan (tabel 11) dengan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue pada pembangunan lain-lain yang terbagi dalam empat jenis kegiatan yakni : generasi muda dengan biaya Rp 225.000, pelaksanaan kegiatan PKK biaya sebesar Rp 125.000, pekan olahraga desa mempunyai biaya Rp 150.000, dan pelaksanaan Musabbakah tilawatil Qur'an dengan biaya Rp 250.000.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemanfaatan sumber pendapatan Desa Pitue dalam pembangunan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber pendapatan Desa Pitue terutama sumber pendapatan yang bukan pendapatan Asli Desa seperti bantuan pembangunan Desa, bantuan dari pemerintah daerah

tingkat I dan II dan bantuan Inpres, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang. Namun dalam pelaksanaan terhadap pembangunan tidak sesuai rencana semula terutama menyangkut pembiayaannya. Hal ini menurut pendapat penulis disebabkan karena pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa berdasarkan tabel 10, yaitu penerimaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, Tahun 1993. Tingkat penerimaan sumber-sumber pendapatan Asli Desa sangat kurang dibandingkan dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hanya secara umum bahwa yang sangat mendekati target penerimaan hanya bersumber pada gotong royong masyarakat Desa. Berdasarkan hal ini, maka penulis menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, terutama untuk bidang pendapatan sangat tinggi.

Begitu pula tingkat perbandingan antara Sumber Pendapatan Asli Desa maupun bukan Pendapatan Asli Desa yaitu mengenai target keseluruhan yang diterima, dimana target penerimaan sumber pendapatan Asli Desa kurang mendekati target, sedangkan pendapatan Asli Desa secara umum dapat dikatakan hampir setiap tahunnya mendekati target. Penyebab kurang tercapainya target sumber pendapatan Asli Desa, karena kebanyakan masih banyak memerlukan pengelolaan lebih lanjut dalam arti harus memerlukan berbagai usaha untuk

mengumpulkan dan kadang tergantung pula kepada pendapatan keluarga suatu Desa, sehingga manakala pendapatan keluarga setiap Desa menurun, maka niscaya partisipasinya dalam pembangunan akan berkurang pula. Dibandingkan dengan yang bukan pendapatan Asli Desa, hal itu tidak memerlukan tenaga atau modal yang lebih banyak karena merupakan sumber pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini Desa Pitue menunggu saja setiap tahun anggaran yang bisa dikenal dengan APBN dan APBD baik pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

Tanggapan Responden mengenai pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue dalam pembangunan yang dikelola oleh aparat Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17

Tanggapan Responden Atas Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Pitue

NO.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat Memuaskan	4	8,89
2.	Memuaskan	27	60,00
3.	Cukup Memuaskan	11	24,44
4.	Tidak Memuaskan	3	6,67
	Jumlah	45	100,00

Sumber : Hasil Pengelolaan Kusisioner, 1993

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli Desa Pitue menurut 4 orang atau 8,89 % responden sangat memuaskan, dan yang menyatakan memuaskan adalah 27 orang atau 60,00 % begitu pula yang menyatakan cukup memuaskan sebanyak 11 orang atau 24,44 % dan yang berpendapat tidak memuaskan sebanyak 3 orang atau 6,67 %.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atas sumber-sumber pendapatan asli Desa Pitue memuaskan.

C. Usaha-Usaha Pemerintah Desa Pitue Untuk Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Desanya

Usaha-usaha Kepala Desa di Kecamatan Ma'rang dalam menggali sumber-sumber pendapatan dengan memiliki cara tersendiri. Untuk mengetahui cara Kepala Desa Pitue dalam menggali sumber pendapatan desa di bawah ini disimpulkan berikut ini :

1. Menambah tanah milik desa dengan jalan membeli lahan baik untuk persawahan maupun untuk perkebunan.
2. Mengadakan gotong royong pembangunan seperti pembuatan jalan baru, pembuatan dekker, dan perbaikan Mesjid.
3. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pemerintah daerah tingkat II baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk uang.
4. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka membina kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan baik berupa materil maupun non materil.

Di atas telah dikonklusikan mengenai usaha-usaha Pemerintah Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan, namun tidaklah lengkap bilamana tidak dipaparkan tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel 18

Tanggapan Responden Atas Usaha Pemerintah Desa Pitue Untuk Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Desa

NO.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Tinggi	15	33,33
2.	Sedang	25	55,56
3.	Kurang	5	11,11
	Jumlah	45	100,00

Sumber : Hasil Pengelolaan Kusioner, 1993

Melihat pemaparan tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh klasifikasi jawaban responden yang menyatakan usaha pemerintah Desa Pitue untuk menggali sumber-sumber pendapatan Desanya antara lain : yang menyatakan Tinggi sebanyak 15 orang atau 33,33 %, yang menyatakan Sedang berjumlah 25 orang atau 55,56 %, dan yang berpendapat Kurang sebanyak 5 orang atau 11,11 %.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah Desa Pitue untuk menggali sumber pendapatan Desa Pitue adalah sedang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa disertai dengan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan tersebut di Desa Pitue, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang sudah cukup mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perencanaan maupun pelaksanaannya sampai kepada pemanfaatannya dalam pembangunan, hanya saja waktu pelaksanaannya biasa berbeda dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan oleh kualitas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang masih tergolong rendah.
2. Melihat sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa sumber-sumber tersebut belum dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa Pitue, sebab semakin hari kebutuhan masyarakat semakin bertambah banyak dan beraneka ragam, sementara hasil sumber-sumber pendapatan Desa Pitue semakin berkurang dan sulit untuk ditingkatkan.

Dengan melihat potensi sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang, maka dapat dikatakan bahwa apabila sumber tersebut dapat digali dan dikelola dengan baik disertai partisipasi masyarakat dan unsur pengelola

dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, maka sumber pendapatan Desa Pitue dapat membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Usaha-usaha Pemerintah Desa Pitue untuk menggali sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang sebagai berikut :

- a. Menambah tanah milik desa dengan jalan membeli lahan baik untuk lahan persawahan maupun untuk lahan perkebunan.
- b. Menyelenggarakan gotong royong seperti pembuatan jalan baru, pembuatan dekker dan perbaikan Mesjid.
- c. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk uang.
- d. Mengadakan pungutan jempitan rumah tangga setiap minggu (sumbangan beras setiap minggu).
- e. Menciptakan kesadaran warga masyarakat.
- f. Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa yang masih kurang.

B. Saran-Saran

Sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa agar dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa berhasil dengan baik dalam arti hasilnya dapat dinikmati oleh

semua masyarakat desa, maka perlu adanya partisipasi masyarakat, karena hal ini merupakan sumber pendapatan Asli Desa yang paling banyak diharapkan dapat menunjang terlaksananya pembangunan Desa. Untuk itu disarankan pada masyarakat agar mau membantu Pemerintah Desa dengan jalan berpartisipasi terhadap program pemerintah, dan bagi masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi dapat mengerti tentang kedudukannya sebagai warga masyarakat yang harus mematuhi segala peraturan Desa yang berlaku.

2. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka memperkuat Pemerintahan Desa, perlu semakin diintensifkan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak yang berkaitan dengan aspek administrasi bagi seluruh personil pemerintahan Desa melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten.

Selain dari itu pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Pitue yang harus lebih teratur waktunya dan diharapkan dapat meningkatkan minat yang lebih besar dari personal pemerintah Desa untuk memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan tidak terjadi.

3. Yang tidak kalah pentingnya dalam usaha meningkatkan pembangunan Desa adalah dilakukannya penelitian yang teratur oleh badan atau lembaga yang ditunjuk, hal itu

untuk dapat memberikan gambaran dan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk satu kurun waktu tertentu tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintah Desa, merupakan organisasi pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Demikianlah gambaran tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Namun masalah yang dikemukakan tersebut belum semuanya dapat diungkapkan sebab meskipun Desa merupakan wilayah pemerintahan terendah, namun dalam melaksanakan aktivitas Pemerintahan Desa itu tidak mudah, karena banyak permasalahan yang dihadapi.

Masalah yang dihadapi oleh Desa tersebut, sebahagian telah diungkapkan oleh peneliti melalui tulisan ini, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan lain yang belum terungkap dan mungkin pada kesempatan lain masalah tersebut dapat diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurachmat, Arifin. 1975. Kerangka Pokok Managemen Umum, Jakarta : Ichtiar Baru.
- Atmosudirjo, Prayudi. 1979. Dasar Administrasi dan Managemen Umum, Jakarta : Seri Pustaka.
- Bayu Suryaningrat. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru.
- Boediono B. 1969. Pajak Penjualan suatu Pengantar, Jakarta : Ramaka.
- Hagual, Peter. 1985. Pembangunan Desa Swadaya Masyarakat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Handyaningrat, Soewarno. 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.
- Ndaradha, Talisiduhu. 1984. Dimensi-dimensi Pembangunan Desa, Jakarta : Buna Aksara.
- Praitno, Hadi. 1985. Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Yogyakarta: Liberty.
- Siagian, H. 1985. Pokok-pokok Pembangunan Desa, Bandung : Mandar Jaya.
- Soejita, Irwan. 1973. Peraturan Daerah, Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
- Soemitro, Rahmat. 1974. Pajak dan Pembangunan, Bandung - Jakarta : Eresco.
- Suwignjo. 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suryadi, A. 1989. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Mandar Jaya.

B. Dokumen

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, R. I. Nomor II/MPR/1978, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Permendagri Nomor I 1982, Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa.

Permendagri Nomor 9 Tahun 1982, Tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

Permendagri Nomor 3 Tahun 1982, Tentang Pungutan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

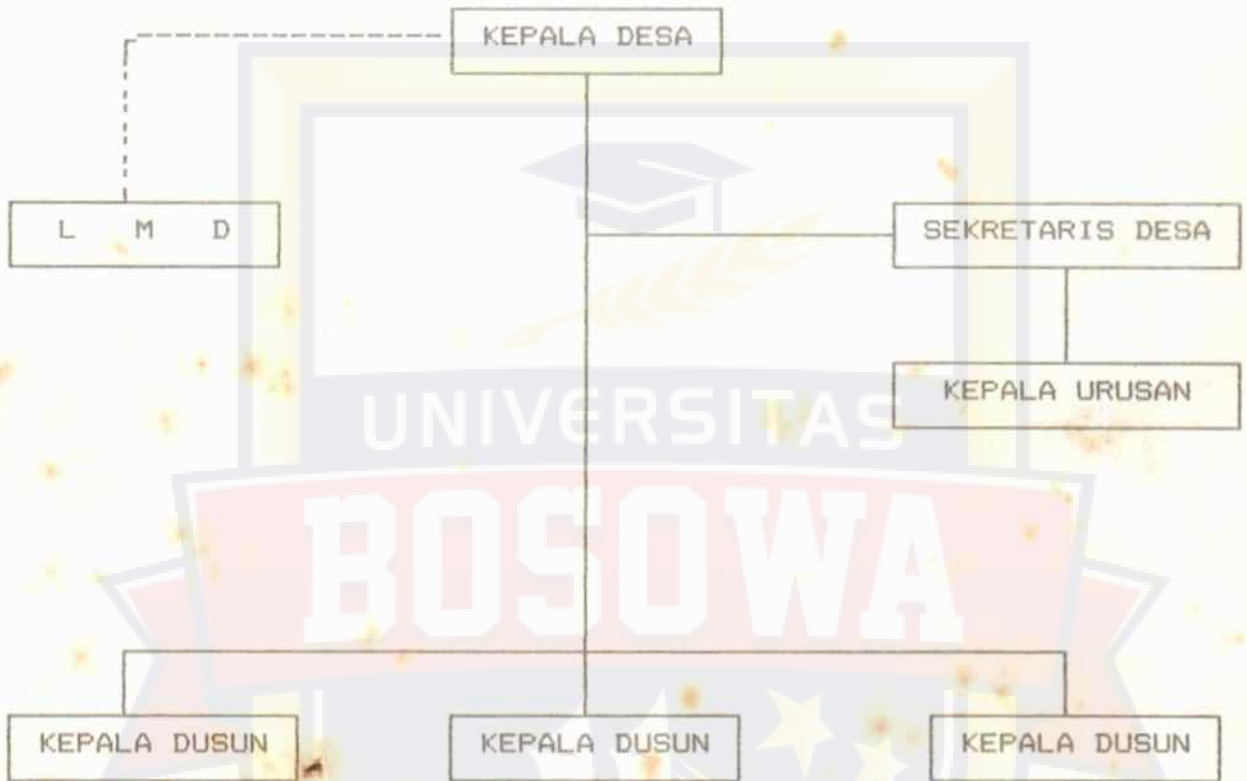
Undang-Undang Nomor II Drt. Tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

C. Diklat

Abdullah, Syukur. Bunga Rampai Administrasi Pembangunan, Ujung Pandang.

Djufrie, Muhammad. Sistem Informasi Manajemen, Ujung Pandang, 1985.

STRUKTUR ORGANISASI DESA PITUE
KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PANGKEP



Keterangan :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Komando